



DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SIDOARJO

EDISI KAMIS, 2 JULI 2026



RINGKASAN BERITA HARI INI

Bupati dan Wakil Bupati Sidoarjo Lantik 80 Kepala Desa Terpilih Hasil Pilkades Serentak 2026

SIDOARJO-Sebanyak 80 kepala desa terpilih hasil Pemilihan Kepala Desa (Pilkades) serentak 2026 di Kabupaten Sidoarjo resmi dilantik. Pelantikan dan pengembalian sumpah jabatan dipimpin langsung oleh Bupati Sidoarjo H. Subandono dan Wakil Bupati H. Subandono di Pendopo Delta Wibawa, Senin (29/6/2026).

Dalam kesempatan tersebut, Bupati Sidoarjo juga memberikan petunjuk teknis kepada kepala desa yang baru pertama kali menjabat. Dari 80 kepala desa yang dilantik, hanya 17 kepala desa merupakan petahana, sedangkan sisanya merupakan wajah-wajah baru, termasuk yang sebelumnya menjabat sebagai sekretaris desa maupun perangkat desa. Kepala Pelaksana Teknis Daerah Wakil Bupati Sidoarjo H. Mimik Idayana, Ketua DPRD Sidoarjo H. Subandono, dan Ketua DPRD Sidoarjo H. Subandono, serta seluruh unsur se-Kabupaten Sidoarjo.

Bupati H. Subandono mengatakan, bahwa pelantikan kepala desa bukanlah akhir dari sebuah kontes politik, melainkan awal dari pengabdian kepada masyarakat. Menurutnya, jabatan kepala desa merupakan amanah yang diberikan rakyat sebagai tanggung jawab yang harus dipertanggungjawabkan kepada Allah SWT.

"Maka hari ini tidak ada lagi sikap-sikap perbedaan. Tidak ada lagi minoritas atau mayoritas. Kita semua adalah warga masyarakat yang sama-sama bertanggung jawab untuk membangun Kabupaten Sidoarjo yang maju, sejahtera, dan berkeadilan," ujarnya.

H. Subandono juga mengingatkan kepala desa yang baru dilantik untuk segera merangkul seluruh elemen masyarakat, termasuk para calon kepala desa yang sebelumnya menjadi lawan.

wan dalam Pilkades beserta para pendukungnya. Menurutnya, keberhasilan menjadi kepala desa dalam memimpin masyarakat adalah kunci utama dalam membangun desa.

"Setelah kembali ke desa masing-masing, saya berharap seluruh calon yang kemarin berkesempatan bisa dirangkul. Sekarang tidak ada lagi lawan, yang ada adalah kawan. Kita semua harus bersinergi untuk membangun desa yang lebih baik," ujarnya.

Ke optimisitas ini dia munculkan dengan menunjukkan bahwa kepala desa akan lebih mudah dijangkau apabila pemerintahan desa dibangun dengan semangat persatuan, kesatuan, dan kekeluargaan. Dia juga meminta Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMDS) bermitra para camat agar segera memberikan pendampingan dan pembinaan kepada para kepala desa baru.

"Demokrasi mengajarkan kita untuk mengorganisir hasil pilihan. Sekarang ini kita sedang membangun desa yang lebih maju dan sejahtera. Kita semua harus bersinergi untuk membangun desa yang lebih baik," ujarnya.

Gesikan pembatalan se awal agar para kepala desa yang baru dilantik, jangan sampai hanya untuk memikirkan konflik politik. Gurakan waktu itu untuk membangun desa yang lebih baik, yang ada adalah kawan. Kita semua harus bersinergi untuk membangun desa yang lebih baik," ujarnya.

Ke optimisitas ini dia munculkan dengan menunjukkan bahwa kepala desa akan lebih mudah dijangkau apabila pemerintahan desa dibangun dengan semangat persatuan, kesatuan, dan kekeluargaan. Dia juga meminta Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMDS) bermitra para camat agar segera memberikan pendampingan dan pembinaan kepada para kepala desa baru.

Wabup Kukuhkan 29 Kepala Puskesmas, Tekankan Turun Langsung Layani Masyarakat

KOTA-Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Sidoarjo memperkuat pelayanan kesehatan dasar dengan mengukuhkan 29 Kepala Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) Puskesmas, Rabu (1/7).

Momentum tersebut tidak sekadar menjadi seremoni pengantian pejabat, tetapi juga penegasan komitmen agar seluruh puskesmas memberikan pelayanan yang cepat, ramah, profesional, dan humanis kepada masyarakat.

Pengukuhan yang berlangsung di Pendopo Delta Wibawa itu dipimpin langsung Wakil Bupati (Wabup) Sidoarjo Mimik Idayana. Dalam arahnya, Mimik mengukuhkan para kepala puskesmas bahwa jabatan yang diemban merupakan amanah sekaligus ladang ibadah karena berkaitan langsung dengan pelayanan kepada masyarakat.

Ia menegaskan, masyarakat yang datang ke puskesmas bukan hanya membutuhkan pengobatan, tetapi juga pelayanan yang cepat, informasi yang jelas, serta sikap yang ramah dari seluruh petugas.

"Saya titip kepada kepala puskesmas yang diukuhkan hari ini agar selalu ingat bahwa jabatan ini adalah ladang ibadah. Masyarakat yang datang ke puskesmas menginginkan pelayanan yang cepat, ramah, dan mendapatkan informasi yang jelas, serta diperhatikan dan diperlakukan dengan baik," ujar Mimik.

Menurutnya, kepala puskesmas merupakan wajah pelayanan kesehatan pemerintah di wilayah masing-masing. Karena itu, budaya melayani dengan hati harus terus dibangun di setiap fasilitas kesehatan. "Layani masyarakat dengan senyuman. Bagi orang yang sedang sakit, senyum dan sikap yang tulus bisa menjadi semangat bagi mereka untuk sembuh," katanya.

Mimik juga meminta para kepala puskesmas tidak hanya menjalankan tugas dari balik meja, la



PELAYANAN: Wabup Sidoarjo kukuhkan 29 kepala puskesmas di Pendopo Delta Wibawa, Rabu (1/7).

hwa kepemimpinan yang baik lahir dari keteladanan, bukan sekadar memberi perintah. Menurutnya, disiplin dan semangat seorang pemimpin akan menjadi contoh bagi seluruh jajaran.

"Kalau pemimpinnya semangat dan disiplin, bawahannya juga akan semangat. Yang penting kompak. Kalau tim solid, pelayanan kepada masyarakat pasti akan semakin baik," ucapnya. (dik/vga)

Kepala Puskesmas Diminta Fokus Tekan HIV/AIDS

SIDOARJO, SURYA - Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Sidoarjo mengukuhkan 29 Kepala Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) Puskesmas di Pendopo Delta Wibawa, Rabu (1/7).

Para kepala puskesmas yang baru diukuhkan itu dituntut menghadirkan pelayanan kesehatan yang cepat, ramah, dan humanis, sekaligus memperkuat upaya penanganan kasus HIV/AIDS di sejumlah wilayah.

Wakil Bupati Sidoarjo, Mimik Idayana, menegaskan jabatan kepala puskesmas merupakan garda terdepan pelayanan kesehatan peme-



PENGUKUHAN - Wabup Sidoarjo Mimik Idayana saat mengukuhkan 29 Kepala Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) Puskesmas di Pendopo Sidoarjo, Rabu (1/7).

yang melekat. puskesmas pada dasarnya menginginkan pelayanan

pala puskesmas tidak hanya bekerja di balik meja, tetapi aktif turun ke lapangan untuk memastikan alur pelayanan berjalan baik, terutama pada aspek administrasi yang menjadi pintu pertama masyarakat. Para pimpinan puskesmas juga diminta menjadi teladan kedisiplinan serta mampu membangun tim kerja yang solid.

Selain penguatan tata kelola layanan, Mimik menyuarakan tantangan kesehatan di Sidoarjo, khususnya tingginya kasus Human Immunodeficiency Virus (HIV) dan Acquired Immunodeficiency Syndrome (AIDS) di sejumlah wilayah.

pengecanaan, edukasi, deteksi dini, serta pendampingan terhadap pasien.

Sementara itu, Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Sidoarjo, Lakhsmie Herawati Yuwantina menyebut pengukuhan ini sebagai bagian dari penguatan tata kelola pelayanan kesehatan primer. Ia berharap para kepala puskesmas dapat bekerja secara profesional, responsif, inovatif, dan berorientasi pada kepuasan masyarakat.

"Kami berharap seluruh kepala puskesmas dapat memperkuat manajemen pelayanan, meningkatkan mutu layanan kesehatan,

Antisipasi HIV/AIDS, Lapas Porong Gelar Tes HIV Sukarela bagi Napi

PORONG-Lapas Kelas I Surabaya atau Lapas Porong Sidoarjo memperkuat langkah pencegahan dan deteksi dini HIV/AIDS di lingkungan pemasyarakatan. Di tengah meningkatnya jumlah kasus HIV/AIDS di Kabupaten Sidoarjo, puluhan warga binaan menjalani tes HIV secara sukarela melalui program Mobile Voluntary Counseling and Testing (VCT) yang digelar bekerja sama dengan Puskesmas Kedungsolo.

Kegiatan yang dipusatkan di Klinik Latubaya Lapas Kelas I Surabaya itu diikuti 30 warga binaan. Selain menjalani tes HIV secara sukarela, peserta juga memperoleh



PEMERIKSAAN: Warga binaan Lapas Porong Sidoarjo sedang menjalani cek kesehatan gratis dan deteksi dini HIV/AIDS.

layanan Cek Kesehatan Gratis (CKG), pemeriksaan fisik menyeluruh, konsultasi kesehatan, hingga konseling terkait pencegahan HIV/AIDS.

Program tersebut menjadi bagian dari upaya meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan sekaligus mendeteksi secara dini berbagai penyakit menular,

termasuk HIV/AIDS.

Bagi warga binaan yang terdeteksi mengidap HIV, penanganan medis dapat segera dilakukan sehingga kondisi kesehatannya tetap terpantau secara optimal.

Kepala Lapas (Kalapas) Kelas I Surabaya Sohibur Rachman menegaskan bahwa pelayanan kesehatan merupakan hak seluruh warga binaan yang harus dipenuhi selama menjalani masa pidana.

"Kesehatan merupakan hak setiap warga binaan yang harus dipenuhi secara optimal. Melalui kegiatan Cek Kesehatan Gratis dan Mobile VCT ini, kami ingin memastikan kondisi kesehatan warga binaan terus

terpantau sekaligus meningkatkan kesadaran mereka terhadap pentingnya deteksi dini dan pencegahan penyakit," ujar Sohibur Rachman, Rabu (1/7).

Ia juga mengapresiasi kolaborasi yang terjalin dengan Puskesmas Kedungsolo dalam memberikan pelayanan kesehatan kepada warga binaan.

"Terima kasih kepada Puskesmas Kedungsolo atas kolaborasi yang telah terjalin dengan baik. Lapas Kelas I Surabaya berkomitmen untuk terus memperkuat kerja sama dengan berbagai instansi dalam menghadirkan layanan kesehatan yang berkualitas bagi warga binaan," tambahnya. (dik/vga)

Bupati dan Wakil Bupati Sidoarjo Lantik 80 Kepala Desa Terpilih Hasil Pilkades Serentak 2026

SIDOARJO-Sebanyak 80 kepala desa terpilih hasil Pemilihan Kepala Desa (Pilkades) serentak 2026 di Kabupaten Sidoarjo resmi dilantik. Pelantikan dan pengambilan sumpah jabatan dipimpin langsung oleh Bupati Sidoarjo H. Subandi di Pendopo Delta Wibawa, Senin (29/6/2026).

Dalam kesempatan tersebut, Bupati Subandi juga memberikan perhatian khusus kepada kepala desa yang baru pertama kali menjabat. Dari 80 kepala desa yang dilantik, hanya 17 kepala desa merupakan petahana, sedangkan sisanya merupakan wajah-wajah baru, termasuk yang sebelumnya menjabat sebagai sekretaris desa maupun perangkat desa. Karena Pelantikan tersebut dihadiri Wakil Bupati Sidoarjo Hj. Mimik Idayana, Ketua DPRD Sidoarjo, jajaran Forkopimda, seluruh Kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD), serta seluruh camat se-Kabupaten Sidoarjo.

Bupati H. Subandi menegaskan bahwa pelantikan kepala desa bukanlah akhir dari sebuah kontestasi politik, melainkan awal dari pengabdian kepada masyarakat. Menurutnya, jabatan kepala desa merupakan amanah yang diberikan rakyat sekaligus tanggung jawab yang harus dipertanggungjawabkan kepada Allah SWT.

"Mulai hari ini tidak ada lagi sekat-sekat perbedaan. Tidak ada lagi nomor urut ataupun kelompok pendukung. Yang ada sekarang adalah kepala desa yang wajib melayani seluruh masyarakat tanpa membedakan pilihan politik," tegasnya.

H. Subandi mengajak seluruh kepala desa yang baru dilantik untuk segera merangkul seluruh elemen masyarakat, termasuk para calon kepala desa yang sebelumnya menjadi la-



SAH: Sebanyak 80 kepala desa terpilih hasil Pemilihan Kepala Desa (Pilkades) serentak 2026 di Kabupaten Sidoarjo resmi dilantik Bupati Sidoarjo Subandi didampingi Wakil Bupati Sidoarjo Mimik Idayana di Pendopo Delta Wibawa, Senin (29/6/2026).



LANCAR: Proses pelantikan 80 kades berjalan dengan lancar dan khidmat. Dari 80 kepala desa yang dilantik, hanya 17 kepala desa merupakan petahana.

wan dalam Pilkades beserta para pendukungnya. Menurutnya, kebersamaan menjadi modal utama dalam mewujudkan pembangunan desa.

"Setelah kembali ke desa masing-masing, saya berharap seluruh calon yang kemarin berkompetisi bisa dirangkul. Sekarang tidak ada lagi lawan, yang ada adalah kawan. Delapan tahun masa jabatan bukan waktu yang singkat. Jangan sampai habis hanya untuk memikirkan konflik politik. Gunakan waktu itu untuk membangun desa," ujarnya.

Ia optimis visi dan misi kepala desa akan lebih mudah diwujudkan apabila pemerintahan desa dibangun dengan semangat persatuan, kerukunan, dan kekompakan. Itu, ia meminta Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) bersama para camat agar segera memberikan pembinaan dan pembekalan kepada para kepala desa baru.

"Demokrasi mengajarkan kita untuk menghormati hasil pemilihan. Sekarang saatnya meninggalkan seluruh perbedaan dan bersama-sama membangun desa agar semakin maju dan masyarakatnya semakin sejahtera," pungkasnya. "Saya minta DPMD dan para camat tidak menunggu program resmi dari pemerintah daerah.

Berikan pembekalan sejak awal agar para kepala desa memahami tugas, fungsi, kewenangan, dan aturan yang harus dijalankan. Semangat saja tidak cukup, harus dibarengi pemahaman terhadap regulasi," katanya.

Bupati Subandi juga menyampaikan apresiasi atas suksesnya pelaksanaan Pilkades Serentak Tahun 2026 yang berlangsung aman, tertib, dan kondusif. Menurutnya, hal tersebut menunjukkan bahwa demokrasi di Kabupaten Sidoarjo berjalan dengan baik.

● Ke Halaman 10

Bupati dan Wakil Bupati...

Ia menyampaikan penghargaan dan terima kasih kepada jajaran TNI, Polri, Forkopimda, panitia penyelenggara, serta seluruh pihak yang telah mengawal jalannya Pilkades sehingga berlangsung dengan aman tanpa gangguan yang berarti.

"Kalaupun masih ada pihak yang menempuh jalur hukum terkait hasil Pilkades, itu adalah hak setiap warga negara. Negara kita adalah negara hukum dan

semua diberikan kesempatan untuk menyelesaikan melalui mekanisme yang berlaku. Namun proses tersebut tidak menghalangi pelaksanaan pelantikan kepala desa yang telah ditetapkan sesuai ketentuan," jelasnya.

DSubandi mengingatkan bahwa setiap peserta Pilkades harus memiliki jiwa demokrasi, yakni siap menang dan siap kalah. Ia berharap seluruh masyarakat dapat menerima hasil Pilkades dengan lapang dada dan kembali bersatu demi kemajuan desa. (dik/vga)

Wabup Kukuhkan 29 Kepala Puskesmas, Tekankan Turun Langsung Layani Masyarakat

KOTA-Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Sidoarjo memperkuat pelayanan kesehatan dasar dengan mengukuhkan 29 Kepala Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) Puskesmas, Rabu (1/7).

Momentum tersebut tidak sekadar menjadi seremoni pergantian pejabat, tetapi juga penegasan komitmen agar seluruh puskesmas memberikan pelayanan yang cepat, ramah, profesional, dan humanis kepada masyarakat.

Pengukuhan yang berlangsung di Pendapa Delta Wibawa itu dipimpin langsung Wakil Bupati (Wabup) Sidoarjo Mimik Idayana. Dalam arahnya, Mimik mengingatkan para kepala puskesmas bahwa jabatan yang diemban merupakan amanah sekaligus ladang ibadah karena berkaitan langsung dengan pelayanan kepada masyarakat.

Ia menegaskan, masyarakat yang datang ke puskesmas bukan hanya membutuhkan pengobatan, tetapi juga pelayanan yang cepat, informasi yang jelas, serta sikap yang ramah dari seluruh petugas.

"Saya titip kepada kepala puskesmas yang dikukuhkan hari ini agar selalu ingat bahwa jabatan ini adalah ladang ibadah. Masyarakat yang datang ke puskesmas menginginkan pelayanan yang cepat, ramah, mendapatkan informasi yang jelas, serta diperhatikan dan diperlakukan dengan baik," ujar Mimik.

Menurutnya, kepala puskesmas merupakan wajah pelayanan kese-



PELAYANAN: Wabup Sidoarjo kukuhkan 29 kepala puskesmas di Pendapa Delta Wibawa, Rabu (1/7).

hatan pemerintah di wilayah masing-masing. Karena itu, budaya melayani dengan hati harus terus dibangun di setiap fasilitas kesehatan. "Layani masyarakat dengan senyuman. Bagi orang yang sedang sakit, senyum dan sapaan yang tulus bisa menjadi semangat bagi mereka untuk sembuh," katanya.

Mimik juga meminta para kepala puskesmas tidak hanya menjalankan tugas dari balik meja. Ia

mendorong mereka rutin turun langsung memantau pelayanan, terutama di bagian administrasi yang menjadi pintu pertama masyarakat memperoleh layanan kesehatan. "Sesekali panjenengan turun langsung melihat bagaimana pelayanan di puskesmas. Cek apakah masyarakat sudah terlayani dengan baik, terutama di bagian administrasi," tegasnya.

Lebih lanjut, ia menekankan ba-

hwa kepemimpinan yang baik lahir dari keteladanan, bukan sekadar memberi perintah. Menurutnya, disiplin dan semangat seorang pemimpin akan menjadi contoh bagi seluruh jajaran.

"Kalau pimpinannya semangat dan disiplin, bawahannya juga akan mengikuti. Yang penting kompak. Kalau tim solid, pelayanan kepada masyarakat pasti akan semakin baik," ucapnya. (dik/vga)

Kepala Puskesmas Diminta Fokus Tekan HIV/AIDS

SIDOARJO, SURYA - Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Sidoarjo mengukuhkan 29 Kepala Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) Puskesmas di Pendopo Delta Wibawa, Rabu (1/7).

Para kepala puskesmas yang baru dikukuhkan itu dituntut menghadirkan pelayanan kesehatan yang cepat, ramah, dan humanis, sekaligus memperkuat upaya penanganan kasus HIV/AIDS di sejumlah wilayah.

Wakil Bupati Sidoarjo, Mimik Idayana, menegaskan jabatan kepala puskesmas merupakan garda terdepan pelayanan kesehatan pemerintah kepada masyarakat. Karena itu, sikap ramah dan pelayanan yang humanis harus menjadi budaya kerja



SURYA/SOK KOMINFO SIDOARJO

PENGUKUHAN - Wabup Sidoarjo Mimik Idayana saat mengukuhkan 29 Kepala Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) Puskesmas di Pendopo Sidoarjo, Rabu (1/7).

yang melekat.

"Saya titip kepada kepala puskesmas yang dikukuhkan agar selalu ingat bahwa jabatan ini adalah amanah. Masyarakat yang utung ke-

puskesmas pada dasarnya menginginkan pelayanan yang cepat, ramah, informasi yang jelas, serta diperhatikan dengan baik," kata Mimik.

Ini juga menjadi para ke-

pala puskesmas tidak hanya bekerja di balik meja, tetapi aktif turun ke lapangan untuk memastikan alur pelayanan berjalan baik, terutama pada aspek administrasi yang menjadi pintu pertama masyarakat. Para pimpinan puskesmas juga diminta menjadi teladan kedisiplinan serta mampu membangun tim kerja yang solid.

Selain penguatan tata kelola layanan, Mimik menyoroti tantangan kesehatan di Sidoarjo, khususnya tingginya kasus Human Immunodeficiency Virus (HIV) dan Acquired Immunodeficiency Syndrome (AIDS) di sejumlah wilayah, termasuk Kecamatan Krian dan Porong. Pemkab meminta puskesmas memperkuat langkah

pencegahan, edukasi, deteksi dini, serta pendampingan terhadap pasien.

Sementara itu, Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Sidoarjo, Laksmi Herawati Yuwantina menyebut pengukuhan ini sebagai bagian dari penguatan tata kelola pelayanan kesehatan primer. Ia berharap para kepala puskesmas dapat bekerja secara profesional, responsif, inovatif, dan berorientasi pada kepuasan masyarakat.

"Kami berharap seluruh kepala puskesmas dapat memperkuat manajemen pelayanan, meningkatkan mutu layanan kesehatan, serta memastikan setiap warga memperoleh akses layanan yang cepat dan berkualitas," ujarnya. (ufi)

Antisipasi HIV/AIDS, Lapas Porong Gelar Tes HIV Sukarela bagi Napi

PORONG-Lapas Kelas I Surabaya atau Lapas Porong Sidoarjo memperkuat langkah pencegahan dan deteksi dini HIV/AIDS di lingkungan pemasyarakatan. Di tengah meningkatnya jumlah kasus HIV/AIDS di Kabupaten Sidoarjo, puluhan warga binaan menjalani tes HIV secara sukarela melalui program Mobile Voluntary Counseling and Testing (VCT) yang digelar bekerja sama dengan Puskesmas Kedungsolo.

Kegiatan yang dipusatkan di Klinik Latubaya Lapas Kelas I Surabaya itu diikuti 30 warga binaan. Selain menjalani tes HIV secara sukarela, peserta juga memperoleh



PEMERIKSAAN: Warga binaan Lapas Porong Sidoarjo sedang menjalani cek kesehatan gratis dan deteksi dini HIV/AIDS.

layanan Cek Kesehatan Gratis (CKG), pemeriksaan fisik menyeluruh, konsultasi kesehatan, hingga konseling terkait pencegahan HIV/AIDS.

Program tersebut menjadi bagian dari upaya meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan sekaligus mendeteksi secara dini berbagai penyakit menular,

termasuk HIV/AIDS.

Bagi warga binaan yang terdeteksi mengidap HIV, penanganan medis dapat segera dilakukan sehingga kondisi kesehatannya tetap terpantau secara optimal.

Kepala Lapas (Kalapas) Kelas I Surabaya Sohibur Rachman menegaskan bahwa pelayanan kesehatan merupakan hak seluruh warga binaan yang harus dipenuhi selama menjalani masa pidana.

"Kesehatan merupakan hak setiap warga binaan yang harus dipenuhi secara optimal. Melalui kegiatan Cek Kesehatan Gratis dan Mobile VCT ini, kami ingin memastikan kondisi kesehatan warga binaan terus

terpantau sekaligus meningkatkan kesadaran mereka terhadap pentingnya deteksi dini dan pencegahan penyakit," ujar Sohibur Rachman, Rabu (1/7).

Ia juga mengapresiasi kolaborasi yang terjalin dengan Puskesmas Kedungsolo dalam memberikan pelayanan kesehatan kepada warga binaan.

"Terima kasih kepada Puskesmas Kedungsolo atas kolaborasi yang telah terjalin dengan baik. Lapas Kelas I Surabaya berkomitmen untuk terus memperkuat kerja sama dengan berbagai instansi dalam menghadirkan layanan kesehatan yang berkualitas bagi warga binaan," tambahnya. (dik/vga)



TANGGUH: Personel Polwan Jenggolo Presisi saat unjuk kebolehan mengendarai motor besar di sela upacara hari Bhayangkara di Mapolresta Sidoarjo.

Upacara Hari Bhayangkara ke-80, Polresta Teguhkan Komitmen Tingkatkan Pelayanan

KOTA-Polresta Sidoarjo menggelar Upacara Peringatan Hari Bhayangkara ke-80 di Lapangan Apel Mapolresta Sidoarjo, Rabu

(1/7). Upacara berlangsung khidmat dengan diikuti personel Polri, TNI, ASN, Satpol-PP, serta dihadiri jajaran Forkopimda dan

berbagai pemangku kepentingan sebagai bentuk sinergi menjaga keamanan dan ketertiban

● Ke Halaman 10



Upacara Hari Bhayangkara...

di Kabupaten Sidoarjo.

Kapolresta Sidoarjo, Kombespol Christian Tobing, bertindak sebagai Inspektur Upacara. Dalam amanat Kepala Kepolisian Daerah Jawa Timur yang dibacakannya, ia menyampaikan apresiasi kepada seluruh jajaran Polda Jawa Timur, pemerintah daerah, TNI, dan seluruh elemen masyarakat atas dedikasi serta kerja sama dalam menjaga situasi keamanan dan ketertiban masyarakat (kamtibmas) tetap kondusif.

"Momentum Hari Bhayangkara ke-80 menjadi refleksi pengabdian Polri

sebagai pelindung, pengayom, dan pelayan masyarakat. Kepercayaan publik harus terus dijaga melalui pelayanan yang semakin profesional, humanis, dan berintegritas," ujar Kombespol Christian Tobing.

Upacara yang dimulai pukul 08.00 WIB tersebut diikuti pejabat utama, para kapolsek jajaran, personel dari berbagai satuan fungsi, serta ASN Polresta Sidoarjo. Rangkaian kegiatan diawali dengan penghormatan kepada Inspektur Upacara, menyanyikan Mars Polri, pemeriksaan pasukan, mengheningkan cipta, pengucapan Tri Brata, hingga pembacaan amanat Kapolda Jawa Timur.

Dalam amanat itu, seluruh jajaran Polda Jawa Timur juga diajak terus menggelorakan semangat Jogo Jawa Timur sebagai bentuk dukungan terhadap program Asta Cita Presiden Republik Indonesia. Sinergi bersama pemerintah daerah, TNI, dan seluruh pemangku kepentingan dinilai menjadi kunci dalam menciptakan stabilitas keamanan serta mendukung pembangunan nasional.

"Kami mengajak seluruh personel untuk terus menjaga kondusivitas kamtibmas, memperkuat kolaborasi dengan seluruh elemen masyarakat, serta meningkatkan kualitas pelayanan publik demi terwujudnya Polri

yang Presisi dan semakin dipercaya masyarakat," tegasnya.

Usai pembacaan amanat, upacara dilanjutkan dengan menyanyikan Andhika Bhayangkari, Hymne Polri, penghormatan pasukan, dan penutupan upacara.

Peringatan Hari Bhayangkara ke-80 menjadi momentum bagi Polresta

Sidoarjo untuk meneguhkan komitmen dalam memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan terbaik kepada masyarakat. Melalui sinergi yang kuat dengan seluruh unsur Forkopimda dan stakeholder, Polresta Sidoarjo berharap situasi keamanan di Kabupaten Sidoarjo tetap aman, tertib, dan kondusif. (surt/vga)

Bupati dan Wakil Bupati...

ia menyampaikan penghargaan dan terima kasih kepada jajaran TNI, Polri, Forkopimda, panitia penyelenggara, serta seluruh pihak yang telah mengawal jalannya Pilkada sebagai

semua diberikan kesempatan untuk menyelesaikan melalui mekanisme yang berlaku. Namun proses tersebut tidak menghalangi pelaksanaan pelantikan kepala desa yang telah ditetapkan sesuai ketentuan," jelasnya.

Disubandi mengingatkan bahwa setiap





INFO MEDIA PERS

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN SIDOARJO

SILPA APBD Sidoarjo Rp608,65 M, DPRD: Jalan hingga Sekolah Belum Maksimal



Sidoarjo (Aksaraindonesia.id) – Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SILPA) APBD Kabupaten Sidoarjo Tahun Anggaran 2025 tercatat mencapai Rp608,65 miliar. Besarnya anggaran yang tidak terserap itu mendapat sorotan dari Fraksi Partai Demokrat-NasDem DPRD Sidoarjo yang menilai pembangunan dan pelayanan publik belum berjalan maksimal. Sorotan tersebut disampaikan Juru Bicara Fraksi Partai Demokrat-NasDem DPRD Sidoarjo, Muh. Zakaria Dimas Pratama, saat menyampaikan pandangan umum fraksi terhadap Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2025 dalam rapat paripurna DPRD Sidoarjo, Rabu (1/7/2026). Menurut Dimas, besarnya SILPA menunjukkan masih ada kemampuan fiskal daerah yang belum mampu diterjemahkan menjadi program pembangunan yang dirasakan langsung oleh masyarakat. "Setiap rupiah yang gagal dibelanjakan berarti masih ada jalan yang belum diperbaiki, saluran yang belum dibangun, sekolah yang belum ditingkatkan kualitasnya, serta pelayanan kesehatan yang belum diperluas," ujar Dimas. Meski memberikan sejumlah catatan kritis, Fraksi Demokrat-NasDem tetap mengapresiasi capaian Pemerintah Kabupaten Sidoarjo yang berhasil merealisasikan pendapatan daerah sebesar Rp5,526 triliun atau 101,35 persen dari target. Pemkab Sidoarjo juga kembali meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Namun, Dimas mengingatkan opini WTP tidak dapat dimaknai sebagai bukti seluruh tata kelola pemerintahan telah berjalan tanpa persoalan. Menurutnya, masih terdapat sejumlah temuan BPK yang perlu segera ditindaklanjuti. Temuan tersebut antara lain berkaitan dengan kekurangan volume pekerjaan konstruksi, ketidaksesuaian spesifikasi teknis, hingga belum optimalnya penerapan denda keterlambatan pada sejumlah proyek. "Opini WTP bukan berarti seluruh tata kelola pemerintahan sudah sempurna. Masih ada berbagai catatan yang harus menjadi perhatian pemerintah daerah," katanya. Fraksi Demokrat-NasDem juga menyoroti realisasi belanja modal yang baru mencapai 75,40 persen. Capaian tersebut dinilai belum optimal dalam mendorong pembangunan infrastruktur maupun fasilitas publik yang berdampak langsung terhadap masyarakat. Selain itu, fraksi tersebut meminta pemerintah daerah mempercepat upaya penagihan piutang daerah yang terdiri atas piutang pajak sebesar Rp548,44 miliar dan piutang retribusi sebesar Rp95,42 miliar. Untuk meningkatkan pendapatan daerah, Dimas mendorong percepatan digitalisasi sistem perpajakan, pembaruan basis data wajib pajak, serta penguatan pengawasan agar penerimaan daerah lebih efektif. Anggota Komisi C DPRD Sidoarjo itu menegaskan, keberhasilan APBD tidak hanya diukur dari tingginya realisasi anggaran, tetapi dari manfaat nyata yang dirasakan masyarakat. "Rakyat tidak bisa hidup dari angka-angka APBD. Rakyat hanya bisa merasakan manfaat dari kebijakan yang benar-benar bekerja. Setiap rupiah APBD harus mampu mengurangi kemiskinan, membuka lapangan kerja, meningkatkan kualitas pendidikan, pelayanan kesehatan, serta mengatasi persoalan banjir yang selama ini dihadapi masyarakat Sidoarjo," pungkasnya.





INFO MEDIA PERS

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN SIDOARJO

DPRD Sidoarjo Fasilitasi Dialog CFD, Akses 6 Gereja Disiapkan Lewat Jalur Alternatif



Sidoarjo (Aksaraindonesia.id) – DPRD Kabupaten Sidoarjo memfasilitasi dialog antara perwakilan enam gereja, Dinas Perhubungan (Dishub), dan Satlantas Polresta Sidoarjo untuk mencari solusi atas dampak penutupan sejumlah ruas jalan saat pelaksanaan Car Free Day (CFD). Hasilnya, akses menuju gereja tetap disiapkan melalui jalur alternatif tanpa mengubah rekayasa lalu lintas yang telah berlaku.

Hearing yang digelar di ruang Komisi A DPRD Sidoarjo, Rabu (1/7/2026), dipimpin Ketua Komisi A DPRD Sidoarjo, H. Rizza Ali Faizin. Pertemuan juga dihadiri Kepala Dishub Sidoarjo, jajaran Satlantas Polresta Sidoarjo, serta pendeta dan perwakilan enam gereja yang terdampak. Hearing yang digelar di ruang Komisi A DPRD Sidoarjo, Rabu (1/7/2026), dipimpin Ketua Komisi A DPRD Sidoarjo, H. Rizza Ali Faizin. Pertemuan juga dihadiri Kepala Dishub Sidoarjo, jajaran Satlantas Polresta Sidoarjo, serta pendeta dan perwakilan enam gereja yang terdampak. Humas Gereja, Yonathan Toar Sangari, mengatakan penutupan akses jalan saat CFD berdampak pada aktivitas ibadah jemaat di enam gereja yang berada di kawasan Sidokumpul dan Sidoklumpuk. Keenam gereja tersebut yakni GKN Sidoarjo, GPDI Elohim, GKJW Sidoarjo, GPIB Sidoarjo, GKI Sidoarjo, dan Gereja Katolik Santa Maria. "Pertemuan ini menjadi ruang dialog untuk mencari titik temu antara kebutuhan pelaksanaan CFD dengan kelancaran akses jemaat menuju gereja," ujar Yonathan. Menurut Yonathan, kepadatan lalu lintas paling terasa saat jadwal ibadah kedua dan ketiga pada Minggu pagi, ketika arus kendaraan jemaat bertemu dengan pengujung CFD. "Kami bersyukur Komisi A DPRD Sidoarjo memfasilitasi dialog ini. Dari empat usulan yang kami sampaikan, dua di antaranya akan segera direalisasikan," katanya. Dua poin yang segera diterapkan yakni penertiban parkir liar di depan gereja dan penyesuaian posisi penutup jalan di kawasan Jalan Kartini agar akses menuju gereja lebih mudah dilalui jemaat. Sementara itu, Kepala Dishub Sidoarjo, Budi Basuki, menegaskan Jalan Kombes Pol M. Duryat tetap ditutup selama pelaksanaan CFD sesuai rekayasa lalu lintas. Namun, pihaknya telah menyiapkan jalur alternatif bagi jemaat. Akses menuju gereja diarahkan melalui Jalan Pahlawan, Jalan Thamrin, Jalan Gajah Mada, kemudian masuk ke jalan penghubung menuju kawasan Jalan Kombes Pol M. Duryat, Untung Suropati, dan Trunojoyo," ujarnya. Selain itu, Dishub memastikan area parkir di sekitar gereja diprioritaskan untuk jemaat. Sedangkan pengujung CFD diarahkan menggunakan kantong parkir yang telah disediakan, seperti di Kantor Inspektorat, Aneka Usaha, SMPN 5 Sidoarjo, dan halaman Polsek Sidoarjo Kota. "Nantinya petugas gereja akan berkolaborasi dengan Dishub membantu pengaturan parkir dan lalu lintas sehingga aktivitas ibadah tetap berjalan lancar," tambahnya. Ketua Komisi A DPRD Sidoarjo, H. Rizza Ali Faizin, mengatakan hearing digelar sebagai tindak lanjut atas aspirasi masyarakat terkait dampak rekayasa lalu lintas CFD terhadap akses menuju tempat ibadah. Alhamdulillah sudah ada titik temu. Rekayasa lalu lintas tetap berjalan, kegiatan ekonomi saat CFD tetap berlangsung, sementara umat dapat beribadah dengan nyaman tanpa terganggu," kata Rizza. Ia menambahkan, kesepakatan tersebut akan mulai diterapkan pada pelaksanaan CFD berikutnya. Dishub akan menempatkan personel di lapangan, sedangkan pihak gereja menyiapkan relawan untuk membantu pengaturan arus kendaraan. "Dengan kolaborasi ini kami berharap CFD tetap berjalan lancar, kegiatan ekonomi masyarakat tetap hidup, dan umat dapat menjalankan ibadah dengan aman dan nyaman," pungkasnya.





INFO MEDIA PERS

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN SIDOARJO

Kasus HIV di Sidoarjo Capai 7000 Orang, Wabup Mimik: Ini PR Besar yang Harus Ditangani Bersama !



KaMedia – Wakil Bupati Sidoarjo, Mimik Idayana, menegaskan penanganan HIV menjadi salah satu pekerjaan rumah (PR) terbesar yang harus segera diselesaikan Pemerintah Kabupaten Sidoarjo. Selain memperkuat upaya pencegahan, ia juga meminta seluruh tenaga kesehatan meningkatkan disiplin dan kualitas pelayanan kepada masyarakat. Berdasarkan data yang diterimanya, sekitar 9.000 warga Kabupaten Sidoarjo telah teridentifikasi mengidap HIV. Angka tersebut menjadi perhatian serius pemerintah daerah untuk mencegah penyebaran kasus melalui edukasi, deteksi dini, serta penguatan layanan kesehatan. Alhamdulillah segera diketahui, ternyata di Sidoarjo sudah sekitar 7.000 masyarakat yang terdampak HIV. Ini menjadi tugas puskesmas, kita semua, dan Pemerintah Kabupaten Sidoarjo untuk ke depannya mengantisipasi serta mencari solusi supaya tidak bertambah banyak,” ujar Mimik, Rabu (1/7/2026). Menurutnya, pemerintah daerah akan terus memperkuat koordinasi lintas sektor agar penanganan HIV berjalan lebih efektif. Upaya tersebut tidak hanya berfokus pada pengobatan pasien, tetapi juga meningkatkan edukasi kepada masyarakat guna menekan potensi penularan. Di sela-sela pembahasan penanganan HIV, Mimik juga menekankan pentingnya kedisiplinan aparat kesehatan, baik di UPTD maupun puskesmas. Ia menilai kualitas pelayanan publik harus diawali dengan kedisiplinan pegawai dalam menjalankan tugas. “Yang paling penting adalah tepat waktu. Kinerjanya nanti akan kita pantau. Yang terpenting bagaimana kedisiplinan pegawai benar-benar diperhatikan,” tegasnya. Terkait informasi mengenai dugaan kekurangan obat bagi pasien HIV, Mimik memastikan ketersediaan obat di fasilitas kesehatan masih aman. “Tidak ada, aman-aman saja,” katanya. Pemerintah Kabupaten Sidoarjo berharap penguatan layanan kesehatan, peningkatan disiplin tenaga medis, serta kolaborasi seluruh pemangku kepentingan mampu menekan laju penyebaran HIV sekaligus meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan bagi masyarakat.





INFO MEDIA PERS

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN SIDOARJO

DPRD Sidoarjo Sepakat Tutup Warung Remang-Remang di Kawasan Tol HK Jabon



Teks Foto : Ketua Komisi A, H. Rizza Ali Faizin, M.Pd [Kaji Reza] memimpin hearing bahas penutupan warung remang-remang di Tol HK Jabon, Rabu [1/7/2026]. [Foto : H. Dar/wartanusa.net]

SIDOARJO – Menjamurnya warung remang-remang dan “warung pangku” di kawasan Tol HK Kecamatan Jabon memicu keresahan mendalam bagi warga sekitar. Menanggapi keluhan tersebut, jajaran kepala desa, Majelis Wakil Cabang Nahdlatul Ulama (MWC NU) Jabon, serta tokoh masyarakat setempat resmi mengadukan persoalan penyakit masyarakat (pekat) ini ke Komisi A DPRD Sidoarjo. Aspirasi tersebut disampaikan dalam Rapat Dengar Pendapat (Hearing) gabungan bersama Komisi A dan Komisi C DPRD Sidoarjo. Hadir dalam pertemuan tersebut Kepala Desa Pangreh, Desa Dukuhsari, serta beberapa kepala desa lain di wilayah Jabon yang secara bulat menuntut penutupan total lokalisasi terselubung tersebut. Dilema Sosial dan Desakan Penutupan Kepala Desa Pangreh, H. Muchamat Zainul, mengungkapkan keprihatinannya. Ia mengaku menyayangkan karena energi masyarakat dan pemerintah harus terkuras untuk menyelesaikan masalah moralitas seperti ini. “Sebenarnya kami malu harus membawa masalah ini ke forum Dewan. Masih banyak persoalan lain seperti ketenagakerjaan dan pertumbuhan ekonomi yang lebih penting untuk dibahas. Namun, keberadaan warung remang-remang di Jabon ini sudah sangat meresahkan dan seharusnya memang tidak boleh ada,” tegas H. Zein, sapaan akrabnya. Desakan senada juga disuarakan oleh seluruh perwakilan warga yang hadir. Mereka menilai keberadaan warung-warung tersebut telah memberikan citra buruk bagi wilayah Jabon. Langkah Mitigasi dan Koordinasi Lintas Sektoral. Merespons tuntutan warga, Anggota Komisi A DPRD Sidoarjo dari Fraksi Gerindra, Achmad Muzayin Syafrial, menyatakan dukungannya terhadap rencana penertiban. Kendati demikian, ia mengingatkan pentingnya aspek legalitas dan mitigasi agar tidak mematikan aktivitas ekonomi warga yang murni berdagang. “Kami sepakat untuk melakukan penertiban. Langkah terbaiknya adalah kita duduk bersama terlebih dahulu dengan pemilik lahan, dalam hal ini Jasa Marga dan PPLS. Jika dalam proses mitigasi dan verifikasi di lapangan terbukti warung tersebut menyediakan praktik prostitusi atau warung pangku, maka tindakan tegas wajib dilakukan,” urai Muzayin. Keputusan Final: Eksekusi Penutupan Segera Dilakukan. Melihat kesamaan pandangan dari mayoritas anggota Komisi A dan C yang hadir, Ketua Komisi A DPRD Sidoarjo, H. Rizza Ali Faizin, M.Pd.I., langsung mengambil keputusan final untuk segera melakukan tindakan nyata di lapangan. “Kita semua sudah satu suara: tutup seluruh warung remang-remang dan warung pangku di kawasan Tol HK. Untuk teknis eksekusinya, kami akan segera berkoordinasi dengan Satpol PP, Kepolisian, TNI, serta pihak pemilik otoritas lahan, yaitu PPLS dan Jasa Marga,” ujar politisi yang juga menjabat sebagai Ketua DPC PKB Sidoarjo tersebut. Guna mematangkan langkah eksekusi dan pengawasan ke depan, hearing ini juga melibatkan jajaran Forkopimka Jabon, di antaranya Camat Jabon Abdul Rokhim, Kapolsek Jabon, serta Danramil Jabon.[dar/nata/red]

wartanusa.com